

## ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOLAI KECAMATAN BONTOLANI KABUPATEN BONE

Oleh:

Asrawan, S.E., M.M

Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

Alamat: Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (92111).

Korespondensi Penulis: [asrawan@usy.ac.id](mailto:asrawan@usy.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to find out how financial management is in increasing development in Bontolai village, Bontolani district. This study uses descriptive qualitative analysis, focusing on the management of Bontolai Village funds. Types and sources of data used are primary and secondary data in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on financial management in increasing development in Bontolai Village start from a process that includes planning, implementation, monitoring and accountability as well as supporting factors and inhibiting factors. Village management carried out by the government of Bontolai Village, Bontolani District, Bone Regency has followed the technical guidelines stipulated in the Bone Regency Regional Regulation Number 37 of 2021 concerning Village Use and Expenditures, in this case namely Transparent, Accountable, Participatory, Orderly and Disciplined budgets where management Bontolai Village finance has implemented this point. Then there are supporting factors consisting of community participation and facilities and infrastructure as well as inhibiting factors consisting of socialization and lack of communication.*

**Keywords:** *Planning, Implementation, Supervision, Accountability.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan keuangan dalam peningkatan pembangunan di desa bontolai kec Bontolani. Penelitian ini

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOJAI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

menggunakan analisis kualitatif deskriptif, dengan memfokuskan pada pengelolaan dana Desa Bontojai. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian Pengelolaan keuangan pada peningkatan pembangunan di Desa Bontojai mulai dari proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat. Pengelolaan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bontojai Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan dan belanja desa, dalam hal ini yaitu Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin anggaran dimana pengelolaan keuangan Desa Bontojai sudah menerapkan point tersebut. Kemudian terdapat Faktor pendukung yang terdiri dari Partisipasi masyarakat dan Sarana dan prasarana serta Faktor Penghambat yang terdiri dari Sosialisasi dan Kurangnya Komunikasi.

**Kata Kunci:** Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pertanggungjawaban.

## **LATAR BELAKANG**

Pemerintah Desa secara mandiri mengurus kewenangan tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan kekayaan milik desa dan keuangan harus di kelola secara mandiri oleh pemerintah desa, tanggung jawab pemerintah desa yang besar kepada masyarakat dalam tata pemerintahan harus menerapkan prinsip akuntabilitas karena semua penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggung jawabkan.

Desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa untuk kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan kekeluargaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian. Maka dengan adanya dana desa yang diberikan untuk pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik, yaitu dengan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat yang ada di desa. Untuk mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah desa dalam waktu yang telah ditetapkan dalam pemanfaatan dana desa.

Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya, maka dapat dikatakan bahwa desa telah diberi kekuasaan untuk mengurus dirinya sendiri atau dalam kata lain, telah diberikan otonomi terhadap desa dengan tujuan agar tercipta kesejahteraan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Dalam menyusun dan mengelola anggaran desa, kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD Desa) di setiap tahun sesuai dengan peraturan. Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan dipemerintahan desa, maka pelaksanaan proses pembangunan khususnya masalah keuangan harus dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa bersama-sama dengan masyarakat desa sehingga dapat dihindari kondisi dimana dapat mengakibatkan tersendatnya pembangunan maupun penyalahgunaan wewenang yang menghambat tercapainya pembangunan itu sendiri.

Desa Bontojai kecamatan Bontocani kabupaten Bone, terletak paling ujung bagian barat daya di kabupaten Bone. Desa Bontojai berbatasan langsung dengan tiga kabupaten yakni, kabupaten Maros, kabupaten Gowa, dan kabupaten Sinjai. Bahasa yang digunakan ada dua yakni bahasa Bugis dan Melayu (perpaduan Konjo dan bahasa Makassar), adapun panggilan bagi keturunan bangsawan adalah Karaeng, Petta, dan Puang.

Desa Bontojai memiliki empat dusun yakni, dusun Maroanging, dusun Mario, dusun Madello, dan dusun Bahong Langi. Dimana jumlah penduduknya sekitar 1.916 jiwa. Selain itu Desa Bontojai memiliki tempat wisata diantaranya Air Terjun Tujuh Tingkat yang terletak di Dusun Maroanging dan Puncak Pendakian Bahong Langi yang terletak di Dusun Bahong Langi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam peningkatan pembangunan desa di Desa Bontojai masih terdapat permasalahan. Diantaranya masih terdapat keterlambatan dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD. Hal ini dikarenakan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Bontojai, kurangnya kerja sama dan koordinasi terhadap permasalahan pembangunan desa di Desa Bontojai. Berdasarkan latar belakang di atas kami mengambil judul penelitian “Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Desa Bontojai”

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOJAI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

karenajika dana ini dikelola dengan jujur, maka hasil Pembangunan juga akan terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya. Karena kesejahteraan suatu masyarakatdesa, terlihat dari Pembangunan yang ada di Desa, baik itu Pembangunan fisik maupun non-fisik.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Desa**

Menurut kamus Bahasa Indonesia, susunan W.J.S Poerwadarminta “Desa” adalah istilah sastra lama yang berarti “tempat”, “tanah” atau “daerah”. Desa juga mengandung arti kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. (kansil, 1983 : 80).

Menurut Bambang Utoyo,Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.

Menurut R. Bintarto, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Menurut William Ogburn dan MF Nimkoff, Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

UU no. 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **Pengertian Pengelolaan Keuangan**

Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, danpengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha.

Menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber

dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

Secara harfiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Sehingga jika disimpulkan manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo et al.:2020:1).

Manajemen keuangan menurut para ahli dalam Irfani (2020:11) manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

### **Pengertian Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Suparno (2001 : 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana- prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001:222) mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.

Inilah Beberapa Definisi (teori dan konsep) Pembangunan Desa Menurut Para

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOJAI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

Ahli:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan Kabupaten.
- b. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif dan berkelanjutan .
- c. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat
- d. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- f. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.
- g. Pembangunan pedesaan

Akan tetapi sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam Pengembangan Desa adalah:

- a. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan.
- c. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, makna dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Bontojai Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data dari sumber dokumen yang berasal dari Kantor Desa Bontojai Kabupaten Bone.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa Di Desa Bontojai**

#### **a. Tahap Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Sehingga, keterlibatan masyarakat harus diikuti sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terutama dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Perencanaan yang musyawarah untukmenjaring aspirasi.

Tahap perencanaan Pengelolaan keuangan Desa di Desa Bontojai telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat Desa.Selain itu, pemerintah Desa juga terbukamenerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan Desa. Desa Bontojai telah mencapai indikator diantaranya adanya kemudahan akses masyarakat semakin menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan bahkan pelayanan dinas, pembentukan tim pelaksana Desa, bentuk manajemen dan inisiatif masyarakat yang bertanggungjawab tentang penggunaan infrastruktur bangunan yang berkelanjutan serta partisipasi masyarakat pada program pembangunan Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Desa Bontojai kecamatan bontocani kabupaten Bone dapat dilihat saat musyawarah dari keikutsertaan masyarakat desa dan jumlah usulan oleh masyarakat pada proses pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan drainase dan lainnya di desa.

#### **b. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOTAI KECAMATAN BONTOLANI KABUPATEN BONE**

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan diartikan penerapan. Nurdin Usman, 2002 mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah disepakati. Alokasi Dana Desa yang diterima bisa digunakan untuk biaya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan beberapa tim penggerak seperti Karang Taruna, tim penggerak PKK, BPD, dan selirih masyarakat desa. Sehingga program pembangunan desa bisa berjalan lebih efektif dengan adanya dukungan dari semua kalangan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka proses pelaksanaan pengelolaan keuangan pada pembangunan desa dalam tahap pelaksanaannya yaitu dengan mengadakan masyarakat dan aparat desa dengan bertukar informasi mengenai apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa bontotai ini. Yang dimana terdapat beberapa alokasi keuangan pada pembangunan di desa bontotai seperti pembangunan Rabat Beton Dujia Mappadang, pembuatan Ibhase Ellukia dan masih ada beberapa pembuatan infrastruktur jalan lainnya. Sehingga nantinya masyarakat dapat menggunakan pembangunan beberapa jalan lainnya dalam kegiatan aktivitas masyarakat di desa bontotai tersebut.

Dan juga Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyaluran dan penggunaan dana di Desa Bontotai menunjukkan bahwa pencatatan penggunaan Keuangan Desa telah dilakukan dengan baik. Penggunaan pengelolaan keuangan desa dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa telah dilaksanakan dengan baik, dan pendistribusian penggunaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **c. Tahap Pengawasan**

Menurut Pramesti dalam Hasniati (2016) Fenomena yang terkait dengan pengawasan dana desa adalah laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Serta APBD Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. Kemudian menurut Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hasniati (2015), dalam aspek pengawasan

Dana Desa, KPK menemukan 3 (tiga) potensi permasalahan, yakni: efektivitas pengawasan pengelolaan keuangan, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik, dan evaluasi dan pengawasan pemerintah daerah belum jelas. Oleh karena itu diperlukan kejelasan aturan dan sistematika pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mengawasi penerapan program-program yang didanai dari dana desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 sehingga dapat mencegah tindakan penyelewengan oleh aparat pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara diatas maka bisa disimpulkan bahwa BPD menjadi pengawas dalam proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan pada pembangunan desa yang dimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa adalah dimana BPD itu bertugas untuk mengawasi berlangsungnya dari penyusunan perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan. Pengawasan tersebut untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan karena pada Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

#### d. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Dalam Pasal 71 disebutkan laporan pertanggungjawaban merupakan bagiandari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan apb desa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara maka pada tahap pertanggungjawaban pada peroses pengelolaan keuangan desa bontojai ini dengan Pembuatan Pelaporan dan penyampaian Pertanggungjawaban pada desa bontojai dilakukan dengan setiap mengeluarkan dana sesuai dengan jumlah kebutuhan program

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOJAI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

kegiatan dan akan dicatat setiap pengeluaran belanja, hal tersebut kami lakukan guna menjadikan keterangan agar dapat bersifat transparansi terhadap pengelolaan keuangan kepada pihak eksternal ataupun masyarakat desa bontojai ini. dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan di desa bontojai ini proses penyampaian informasi dan pelaporan telah dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat dan pemerintah lebih mudah dalam proses meningkatkan ekonomi desa beringin secara bersama-sama.

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Bontojai**

Dalam pelaksanaanya pengelolaan keuangan desa terhadap kegiatan pembangunan itu berbagai faktor yang mempengaruhi baik yang sifatnya mendukung maupun faktor yang menjadi penghambat proses pengelolaan keuangan. Adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan terhadap pembangunan desa.

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah sebagai masukan kebijaksanaan, strategis, komunikasi, media pemecahan publik dan terapi sosial. Keikutsertaan masyarakat ini akan membawa pengaruh positif, dimana mereka akan bisa memahami atau mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang akan diambil. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian dari proses perencanaan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan, aspirasi masyarakat yang terkena dampak sehingga dampak negative yang ditimbulkan dapat dihilangkan serta sebagai upaya para perencana untuk memperoleh input dari masyarakat tentang segala sesuatu yang menyangkut nasib mereka.

Faktor yang mendukung terlaksananya proses pengelolaan Keuangan di desa Bontojai adalah partisipasi masyarakat yang baik. Masyarakat hanya menggunakan anggaran untuk merespon setiap proyek. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat untuk mendonasikan sedikit tanahnya kepada pemerintah desa.

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan dan proyek. Tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu pertama, untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan. Perencanaan dan penentuan permintaan yang tidak tepat adalah kesalahan dalam pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana, gagal mempertimbangkan kebutuhan masa depan, dan gagal menganalisis kebutuhan secara cermat berdasarkan tingkat signifikan dana yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara maka pemerintah desa bontojai dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pembangunan desa memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada para masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa seperti menyediakan tempat istirahat dan juga menyediakan dapur umum yang dapat digunakan sebagai tempat untuk makan siang pada saat melaksanakan kegiatan pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan semangat para masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan desa.

### b. Faktor Penghambat

#### 1) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa beringin komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Bontojai mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOTAI KECAMATAN BONTOLANI KABUPATEN BONE**

Dan Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pemerintah Desa Bontotai disebutkan bahwa dalam melaksanakan program pengelolaan keuangan desa biasanya terjadi miss komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara unit kerja. Miss komunikasi antarunit kerja sering memicu terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa.

## **2) Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat.

Namun berdasarkan hasil penelitian beberapa warga Desa Bontotai yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang pengelolaan keuangan desa terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap pengelolaan keuangan desa melalui pemerintah juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak sebagian warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pembangunan maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang akan dilaksanakan oleh aparat desa maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui wawancara diatas maka adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan dana di Desa Bontotai telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum masyarakat Desa. Selain itu, pemerintah Desa juga terbuka menerima semua saran dari masyarakat tentang kemajuan pembangunan Desa.

Pada tahap pelaksanaan Pengelolaan keuangan pembangunan Desa Bontojai melakukan pembuatan beberapa akses rabat beton maupun drainase dalam peningkatan kualitas pembangunan desa menjadi lebih baik, prinsip transparansi dalam pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik memberikan informasi kepada publik melalui komunikasi langsung kepada tokoh masyarakat, yang membuat spanduk pada setiap kegiatan pelaksanaan yang didanai oleh Anggaran Desa.

Tahap Pengawasan pengelolaan keuangan pada desa Bontojai yang diawasi langsung oleh BPD sehingga sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Tahap pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Bontojai baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan manajemennya bagus, tetapi tetap harus mendapat bimbingan dari pemerintah kecamatan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dan pengelolaan dana desa antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat dalam lahan diserahkan kepada pemerintah desa dengan sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah Kurangnya ataupun biasa terjadi mis komunikasi terhadap warga maupun sesama unit kerja. Hal ini menyebabkan komunikasi masyarakat tidak dapat mengungkapkan pendapat di depan umum dan juga masih ada beberapa masyarakat yang belum banyak paham dikarenakan minimnya pengadaan sosialisasi

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka adapun saran yang dibuat oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Saran bagi pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas kegiatan pelaksanaan Pembangunan Desa dan perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap aparat desa/tim pengelola yang secara langsung bertanggungjawab atas dana desa yang dikelolanya.

### **2. Saran Bagi Masyarakat**

Diharapkan masyarakat juga memiliki peran aktif dalam penyusunan RPJM Desa

# **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOJAI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE**

maupun RKP Desa serta memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemerintahan desa agar pelaksanaan pembangunan desa dapat tepat guna dan tepat sasaran. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah desa juga dapat mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

### **3. Saran Bagi Peneliti**

Selanjutnya Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Aprilia, D., & Susilo, D. E. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Technomedia Journal*, 6(2 Februari), 197-211.
- Arif, Muhammad. (2007). Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32.
- Eti, K., & Rahmawati, S. D. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 120-124.
- Hasrul, D. M. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan dalam Peningkatan Pembangunan di Desa Angkasa Pura. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(2), 167-176.
- Hurriyaturrohman, H., Indupurnahayu, I., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 16(1), 12-18.
- Jonathan, S. (2006). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
- Mulyardi, d. (2017). Analisis pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa lubuk siam kecamatan siak hulu kabupaten kampar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

- Nunu, B. M., Risnaningsih, R., & Sulistyowati, Y. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Putri, o. H., & zasriati, m. (2022). Analisis pengelolaan dana desa. Jurnal akrab juara, 7(2), 36-43.
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(01).
- Saputra, H. (2019). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Untuk Pembangunan Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa- desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). Jurnal Akuntansi, 6(2).
- Sri Ravika Jamaluddin.2020.Analisis Perencanaa Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sulastri, N. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” Universitas Halu Oleo.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 74-86.